

BAB I

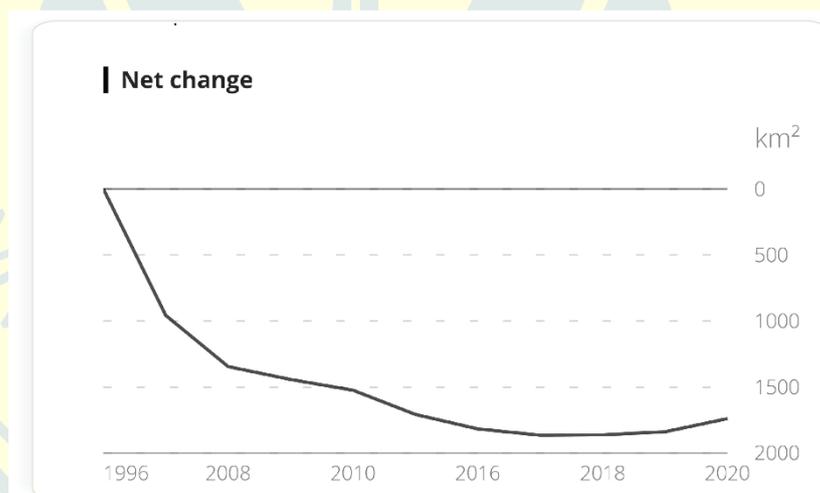
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan laut, lebih tepatnya yaitu sekitar 3,25 juta km² adalah lautan dan ditambah zona ekonomi eksklusif sekitar 2,55 juta km², sementara wilayah daratannya mencapai kurang lebih 2,01 juta km² (Ditjen PRL, 2021). Dengan luas hampir tiga kali lipat dari daratannya tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang melimpah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2021 potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai total Rp19.371 triliun/tahun. Potensi tersebut berasal dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan bakau, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumber daya alam non-konvensional dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dimana sektor-sektor tersebut menjadi tanggung jawab KKP dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) (BRSDM KP, 2021).

Nilai ekonomi kelautan dapat diketahui potensinya dengan melihat beberapa komponen yang ada di laut di antaranya adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan komponen pesisir laut yang sensitif terhadap perubahan yang terjadi (Zhang, 2021). Berkurangnya areal mangrove akan berdampak pada berkurangnya areal tambak dan lahan pertanian juga merusak infrastruktur dan permukiman di wilayah pesisir karena tergerus oleh gelombang laut (KLHK, 2021). Laporan State of the World's Mangrove 2022, menyatakan bahwa luas hutan mangrove di seluruh dunia pada tahun 2020 mencapai 14.735.900 ha dengan 20 persen diantaranya berada di Indonesia atau urutan satu negara dengan luas mangrove terbesar di dunia. (Global Mangrove Alliance, 2022). Hal tersebut merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik.

Peta global yang dikembangkan oleh Global Mangrove Watch (GMW), yang bekerja sama dengan Global Mangrove Alliance (GMA) sejak 2019, menunjukkan luas habitat mangrove di seluruh dunia termasuk Indonesia antara tahun 1996 sampai yang terbaru pada tahun 2020. Peta global tersebut menunjukkan luas habitat mangrove di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 1996 sampai 2016 dimana luas mangrove terus menurun. Perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2017 tidak tampak kelihatan. Setelah itu pada tahun berikutnya, tahun 2018 sampai 2020 mulai mengalami tren perubahan luas yang positif atau luas habitat mangrove di Indonesia terus meningkat. Namun luas tersebut belum sebanding dengan penurunan yang terjadi antara tahun 1996 hingga 2020 yaitu sebesar 173.904 ha. Berikut adalah perubahan luas mangrove yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Perubahan Hutan Mangrove di Indonesia
Sumber: Global Mangrove Watch

Pembangunan area permukiman dan komersial, Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2 merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak buruk bagi luas kawasan mangrove. Luas lahan mangrove di Kawasan PIK 1 dan 2 pada tahun 2013 adalah sebesar 16,612 km² dan terus berkurang menjadi 14,532 km² pada 2023 (Putri, 2024).

Hutan Mangrove selain berfungsi sebagai penahan intrusi air laut, juga berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis ikan. Jika di wilayah Angke, Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, jenis ikan konsumsi yang berasosiasi

dengan mangrove yaitu ikan sepat, ikan bulan-bulan dan ikan belanak (Wahyudewantoro, 2015). Selain itu juga kawasan mangrove ini dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan rekreasi alam, seperti Taman Wisata Alam Angke Kapuk.

Selain hutan mangrove yang menentukan nilai ekonomi kelautan adalah kualitas air laut. Kualitas air laut menentukan jumlah biota laut dan aktivitas manusia di daerah pesisir dan laut (Hamuna, 2018). Jika kualitas air laut tercemar, maka akan berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas di wilayah pesisir dan laut (Ukwe et al., 2006)

Perairan Teluk Jakarta saat ini dalam keadaan terancam khususnya oleh limbah domestik dan industri manusia. Pada 2018 saja terdapat 133 ton sampah yang berhasil terangkut Pemprov DKI Jakarta dari utara Kawasan Mangrove Muara Angke (KLHK, 2018). Kondisi pencemaran sampah di sekitar ekosistem mangrove dan perairan Muara Angke termasuk kategori cukup berat. Terdapat jenis sampah yang cukup berat terutama sampah yang tidak bisa terurai (*non-degradable*), seperti plastik, *styrofoam*, sandal/ karet, kaca dan kaleng telah mendominasi kawasan ekosistem mangrove dan perairan di Muara Angke (Suryono, 2019). Teluk Jakarta yang berbentuk semi tertutup juga menambah tingkat pencemaran di wilayah perairan ini. Bahan pencemar baik berupa limbah domestik, organik, industri, logam berat maupun tumpahan minyak yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu (Sachoeemar, 2007). Hal ini sangat memprihatinkan mengingat nilai ekonomi kelautan yang cukup besar. Jika pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta terus dibiarkan, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian pada beberapa biota laut dan juga mempengaruhi sektor rekreasi dan pariwisata yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian (NOAA, 2016).

Belum lagi semenjak berlakunya Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pemerintah terus melakukan kegiatan reklamasi di sepanjang Teluk Jakarta. Hal ini tentu berdampak pada menyempitnya wilayah tangkap nelayan (*fishing ground*) yang menyebabkan pendapatan mereka menurun dan resiliensi mereka semakin melemah

(Anugrahini, 2018). Pada penelitian Wagiyono et al. (2006) menyebutkan terdapat 498 unit alat tangkap sero lalu menjadi 182 unit (Nugraha et al., 2020).

Oleh karena itu, valuasi ekonomi wilayah perairan laut diperlukan untuk mengukur kerugian apabila terjadi kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya laut. Dari valuasi tersebut maka dapat diperkirakan angka kerugiannya dengan menghitung manfaat langsung maupun tidak langsung dari perairan Teluk Jakarta. Selain itu, penilaian ekonomi saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia bersifat spasial, yaitu menghitung nilai ekonomi untuk seluruh wilayah perairan Indonesia dengan nilai yang sama berdasarkan angka pemanfaatan per hektarnya. Hal tersebut menimbulkan masalah karena dianggap tidak rasional dan adil antar wilayahnya. Untuk itu, penelitian yang berjudul “Valuasi Ekonomi Berbasis Spasial pada Kawasan Perairan Teluk Jakarta” ini memetakan secara spasial faktor-faktor yang menjadi penentu nilai ekonomi berdasarkan sensitivitas ekologisnya dan memperkirakan biaya untuk mengembalikan kondisi ekosistem jika terjadi penurunan akibat aktivitas manusia. Analisis ini berguna dalam menentukan target lingkungan hidup dan memutuskan bagaimana mengalokasikan belanja pemerintah. Selain itu, valuasi ini diharapkan dapat digunakan untuk membuat keputusan perencanaan dan pengelolaan tata ruang laut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana nilai ekonomi dari perairan Teluk Jakarta berdasarkan sensitivitas ekologisnya?
2. Parameter apa yang paling berpengaruh dalam menyumbang nilai rata-rata valuasi per hektare?
3. Bagaimana persebaran nilai ekonomi dari perairan Teluk Jakarta berdasarkan sensitivitas ekologisnya yang meliputi kualitas air laut, tangkapan ikan, dan ekosistem mangrove?

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh pembatasan sebagai berikut.

1. Perhitungan nilai ekonomi dilakukan dengan berbagai metode yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Nilai non pasar, seperti kualitas air diperoleh dengan metode *choice experiment* (CE), sedangkan nilai pasar diperoleh dari data sekunder milik dinas Provinsi DKI Jakarta. Namun, beberapa nilai non pasar dan nilai pasar lainnya ada juga yang diperoleh dengan metode *benefit transfer*, seperti nilai biodiversitas mangrove, perikanan mangrove, dan rekreasi mangrove. Sedangkan nilai pemanfaatan breakwater mangrove diperoleh dengan metode *replacement cost*
2. Harga perikanan tangkap, harga ekowisata mangrove, harga pembuatan *breakwater*, dan nilai biodiversitas menjadi nilai ekonomi yang diperoleh pada pemanfaatan ekosistem mangrove, dimana seluruh ekosistem mangrove dianggap memiliki kondisi yang sama dan baik. Harga suka rela yang dikeluarkan masyarakat dan harga kompensasi untuk membayar pemulihan kualitas air laut menjadi nilai ekonomi yang diperoleh pada kualitas air laut. Nilai produksi perikanan pada masing-masing daerah tangkapan ikan menjadi nilai ekonomi yang diperoleh pada daerah tangkapan ikan.
3. Penelitian ini menghasilkan peta valuasi ekonomi di wilayah perairan Teluk Jakarta berdasarkan sensitivitas ekologinya. Sensitivitas ekologi perairan Teluk Jakarta dalam penelitian ini merupakan komponen-komponen ekologi yang rentan terhadap gangguan atau perubahan terutama yang disebabkan oleh aktivitas manusia di wilayah perairan tersebut. Sensitivitas ekologi di wilayah kajian ini meliputi ekosistem mangrove, kualitas air laut dan daerah tangkapan ikan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah “Bagaimana valuasi ekonomi di perairan Teluk Jakarta berdasarkan

indikator sensitivitas ekologi yang mencakup ekosistem mangrove, daerah perikanan tangkap dan kualitas air laut jika dilihat dari spasial wilayahnya?”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan ruang laut. Berikut adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

- 1) Penelitian ini berguna untuk menentukan target lingkungan hidup dan memutuskan bagaimana mengalokasikan belanja pemerintah.
- 2) Untuk mempertimbangkan nilai-nilai publik dan mendorong partisipasi masyarakat, seperti pajak bangunan di kawasan tersebut.
- 3) Memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan perencanaan dan pengelolaan tata ruang laut.
- 4) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai dari sumber daya alam yang dapat dinikmati secara langsung maupun tidak langsung dan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan keberlanjutan.

Intelligentia - Dignitas